

**KEBUTUHAN INVESTOR DAN KREDITOR ATAS INFORMASI DALAM
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Oleh:

Armel Yentifa (Politeknik Universitas Andalas)

Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak (Fak. Ekonomi Universitas Andalas)

Suhanda, SE. M.Si, Ak (Fak. Ekonomi Universitas Andalas)

The aim of this research is to identify the user information needs of the governmental financial reports and the suitability between the rules of the governmental financial reports and user needs of the governmental financial reports. Respondents in this research are the investors and creditors as one of the main user groups of the governmental financial reports. The respondents are 43 company and 20 bank in West Sumatera. Data are collected by a survey method. Questionnaires are distributed by both directly and email.

The statistic method used in testing the hypothesis is descriptive statistic. Comparison between the rules of the governmental financial reports and the investors and creditors information needs of the governmental financial reports is done by using content analysis. An additional analysis is conducted in order to know the influences of respondents' characteristics towards the user information needs of the governmental financial reports by using Multivariate Analysis of Variance (MANOVA).

The result indicates that the financial information, economic information, the compliance to the rules, performance, planning and budgeting, and narrative information are strongly needed in the governmental financial reports. Having been compared with the rules of the governmental financial reporting in The Government Regulation No. 24, 2005 (Government's Standard of Accounting) and The Regulation of the Minister of Domestic Affairs No. 13, 2006, the rules of the governmental financial reporting did not completely accordance with the user needs. Meanwhile, the MANOVA result indicates that the characteristics of respondents, i. e. the education level (senior high school, diploma, undergraduate and graduate) and the education background (accounting and non accounting) significantly influence the investors and creditors information needs of the governmental financial reports.

Key words: *user information needs of the governmental financial reports, investors, creditors*

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya ada suatu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk pelaporan keuangan, dimana kita dapat melihat segala yang terjadi di dalam entitas tersebut, yaitu pemerintahan. Ryan et al. (2002) dalam Mulyana (2006) yang menyatakan bahwa ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan pemerintah yaitu *accountability* (akuntabilitas) dan *decision usefulness* (pengambilan keputusan). Hal yang senada juga dinyatakan dalam SAP (2005) paragraf 10, bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Tetapi berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan ternyata informasi yang terdapat dalam pelaporan keuangan pemerintahan tidak digunakan dalam pengambilan keputusan. Di Swedia para politisi dan manajer senior pemerintahan tidak menggunakan informasi akuntansi aktual yang disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintahnya (Paulsson, 2006). Sementara itu, di Italia para pengguna juga belum memanfaatkan informasi akuntansi pemerintahannya (Steccolini, 2002). Demikian juga dengan di Indonesia, kepala SKPD tidak memanfaatkan secara optimal informasi yang terdapat dalam pelaporan keuangan pemerintahan (Fontanella, 2010).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengguna dalam memanfaatkan pelaporan keuangan Pemerintah. Hasil penelitian di Swedia menunjukkan bahwa *user* tidak memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah karena beban kerja yang berat dan ketidakpahaman mereka atas informasi akuntansi aktual yang tersedia (Paulsson, 2006). Steccolini juga menemukan bahwa para pengguna tidak memanfaatkan informasi akuntansi

pemerintahannya karena rendahnya kualitas informasi yang tersedia (Steccolini, 2002).

Sementara di Indonesia pengguna belum memanfaatkan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah antara lain disebabkan oleh lemahnya teori dan praktik akuntansi pemerintahan serta rendahnya pemahaman SDM pemerintahan terhadap akuntansi pemerintahan itu sendiri (Hapsari, 2008). Sementara Martiningsih (2008) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi pengguna pelaporan keuangan pemerintah oleh Masyarakat. Senada dengan Martiningsih, Fotanella (2010) juga menyatakan tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengetahuan akuntansi serta kesesuaian antara informasi yang dibutuhkan dengan informasi yang tersaji didalam pelaporan keuangan mempengaruhi pemanfaatan pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh kepala SKPD.

Menurut Bastian (2006), pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia menggunakan referensi internasional (*International Public Sector Accounting Standards* atau IPSAS dengan memperhatikan praktik yang lazim berlaku di Indonesia. Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah tidak diawali dengan riset kebutuhan informasi pengguna pelaporan keuangan pemerintahan di Indonesia. Akibatnya, proses awal penyusunan standar akuntansi pemerintah tentang ragam dan isi pelaporan keuangan lebih merupakan proses kajian pustaka. Ini tentunya tidak mendasarkan pada kondisi riil kebutuhan penggunanya.

Informasi akuntansi yang tersaji didalam pelaporan keuangan pemerintahan digunakan oleh berbagai pengguna. Mardiasmo (2004) mengidentifikasi sepuluh pemakai pelaporan keuangan pemerintah, yaitu: (1) pembayar pajak (*tax payer*), (2) pemberi dana bantuan (*grantors*), (3) investor dan kreditor, (4) pengguna jasa (*fee-paying service recipients*), (5) Karyawan/ pegawai, (6) pemasok (*vendors*), (7) dewan legislatif, (8) manajemen, (9) pemilih (*voters*), (10) badan pengawas (*oversight bodies*).

Penelitian ini akan difokuskan pada kelompok Investor dan Kreditor yang merupakan salah satu pengguna pelaporan keuangan pemerintah daerah. Informasi yang disajikan didalam pelaporan keuangan pemerintahan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh investor dan kreditor khususnya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam berinvestasi di suatu daerah atau berinvestasi pada proyek-proyek pemerintah dan keputusan pemberian kredit pada pemerintah daerah ataupun pada proyek-proyek pembangunan infrastuktur oleh pemerintah, karena tujuan pelaporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai media akuntabilitas tetapi juga berfungsi untuk *decision usefulness*.

Investasi merupakan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya potensial menjadi kekuatan ekonomi riil (Sarana, 2010). Sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata. Investasi merupakan suatu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tidak mudah bagi suatu daerah untuk menarik investor menanamkan modalnya disuatu daerah, demikian juga dengan daerah Sumatera Barat, hal ini ditandai dengan penurunan investasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2003-2005 nilai investasi di Sumatera Barat berdasarkan harga konstan memperlihatkan trend yang menurun secara berturut-turut sebesar 5.081,41 Milyar, 4.830,44 Milyar dan 4.777,13 Milyar (BPS, 2005). Dilihat dari ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) tahun 2006-2009, ICOR Sumatera Barat memperlihatkan trend yang menurun. Pada tahun 2006 dan tahun 2007 adalah 3,6, pada tahun 2008 turun nilainya menjadi 3,5 dan pada tahun 2009 turun nilainya menjadi 3,4 (tim peneliti Universitas Andalas, 2009). Padahal Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang handal seperti: hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, Industri olahan, hasil pertanian dan perkebunan, hingga pariwisata serta sumber daya manusia yang seharusnya merupakan faktor-faktor yang dapat menarik investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat, tetapi kenyataannya Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki investasi yang terendah di tingkat regional Sumatera BPS

(2005). Berbagai faktor mempengaruhi masuknya investasi ke suatu daerah. Pambudi (2005) menyatakan bahwa faktor yang paling mempengaruhi investasi disuatu daerah adalah masalah kepastian hukum dan pelayanan dari pemerintah, faktor sosial dan politik, struktur ekonomi, potensi daerah, produktivitas tenaga kerja serta infrastruktur fisik.

Infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah merupakan *Public Service Obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan, sehingga pada tahap awal pembangunan disuatu negara hal tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah hal ini yang dibiayai dari APBN murni. Permintaan terhadap pelayanan infrastruktur akan meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Permasalahannya justru peningkatan permintaan "diimbangi" dengan penurunan kemampuan Pemerintah (Kurdi, 2010).

Secara ideal, seluruh infrastruktur ekonomi seharusnya dibangun oleh negara, rakyat tidak dibebankan biaya pemakaian. Tetapi kemudian menjadi dilematis lagi yaitu antara kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan ekonomi dan keterbatasan APBN dan APBD untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut. Pemerintah masih kesulitan dengan anggaran keuangan negara, sehingga selama ini banyak proyek pemerintah yang didanai dengan pinjaman luar negeri. Menurut Suzeta (2009) kemampuan pendanaan pemerintah untuk pembangunan proyek infrastruktur hanya 30%, untuk itu perlu kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam proyek-proyek pembangunan. Kemitraan Pemerintah dan Swasta adalah bahwa kewenangan kepemilikan asset masih dimiliki oleh Pemerintah, sedangkan untuk pengelolaannya menjadi hak Swasta.

Selain itu kerjasama dengan bank juga dibutuhkan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan pemerintah. Dengan likuidnya perbankan nasional yang tercermin di antaranya dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang banyak diparkir di SBI, bahkan per 6/4/2010 dana pihak ketiga yang parkir di bank sudah mencapai Rp 1.963 triliun (Kompas, 2010), maka pemerintah memutuskan bahwa sebahagian proyek infrastruktur agar dibiayai oleh pinjaman perbankan dalam negeri (Nugroho, 2007).

Sebelum memberikan kredit, bank terlebih dahulu melakukan kegiatan penilaian kredit merupakan kegiatan untuk menilai keadaan calon debitur. Analisis kredit yang kurang akurat pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Penilaian kredit menggunakan Prinsip perkreditan disebut juga sebagai konsep 5C dan 7P untuk mengevaluasi nasabahnya. Pada dasarnya konsep ini akan dapat memberikan informasi mengenai iktikad baik (*willingnes to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.

Investor dan kreditor akan memanfaatkan pelaporan keuangan pemerintah jika informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan mereka. Agar dapat bermanfaat maka pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusannya, namun berdasarkan kesimpulan sementara peneliti, Pelaporan keuangan pemerintah belum mengungkapkan informasi penting yang membantu investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan karena pelaporan keuangan saat ini lebih mengutamakan tujuan akuntabilitas dari pada tujuan prospektif dan prediktif yang seharusnya, sama-sama diutamakan.

Beberapa studi juga telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu Anthony (1978), Drebin (1981), Jones (1985) dalam Martiningsih (2008). Kemudian dilanjutkan oleh Daniels and Daniels (1991), serta Mack and Ryan (2006) dan Martiningsih (2010). Berikut ini adalah

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna pelaporan keuangan pemerintahan berbasis riset terdahulu.

Tabel 1
Jenis Informasi yang Dibutuhkan Berbasis Riset Terdahulu

Jenis Informasi	Anthony (1978)	Drebin (1981)	Jones (1985)	Daniels & Daniels (1991)	IFAC PSC Study 1 (1991)	Mack & Ryan (2006)	IPSAS 1 (2007)	Martini ngsih (2008)
Kondisi Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√
Kondisi Ekonomi		√		√			√	
Kepatuhan terhadap aturan	√	√	√	√	√	√	√	√
Kinerja	√	√	√		√	√	√	√
Perencanaan dan penganggaran		√	√	√	√	√		√
Narativ						√		√

Sumber: martiningsih (2008).

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Informasi Apakah yang dibutuhkan oleh investor dan kreditor dari pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah aturan tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai kebutuhan investor dan kreditor?
3. Apakah tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan investor dan kreditor mempengaruhi kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintahan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jenis informasi apakah yang dibutuhkan investor dan kreditor terhadap pelaporan keuangan pemerintahan daerah.
2. Untuk mengetahui apakah aturan tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai kebutuhan investor dan kreditor.
3. Untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan investor dan kreditor terhadap kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi:

- a. Bagi pihak eksekutif sebagai pengguna dan sekaligus sebagai penyaji pelaporan keuangan pemerintah: mendorong agar lebih menyadari pentingnya penyajian pelaporan keuangan secara lengkap dan pemberian kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses pelaporan keuangan tersebut. Penyajian pelaporan keuangan bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang digariskan oleh peraturan perundangan yang berlaku, tetapi juga harus disadari bahwa penyajian pelaporan keuangan tersebut dibutuhkan sebagai sarana peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan kepada pengguna serta untuk pengambilan keputusan.
- b. Bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah: sebagai bahan pertimbangan Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyempurnakan Standar Akuntansi Pemerintah khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 1 tentang Penyajian pelaporan Keuangan.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana dan literature penelitian akuntansi dan pemanfaatan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Investor dan kreditor sebagai salah satu kelompok pengguna utama laporan keuangan pemerintahan (KKSAP paragraf 16). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah oleh pimpinan perusahaan kategori menengah dan besar yang mewakili investor dan pimpinan bank yang mewakili kreditor, karena pimpinan perusahaan dan pimpinan bank di Sumatera Barat.

F. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder, berupa literatur review dan dokumen review. Dokumen review berupa profil wilayah, data investasi, Laporan perekonomian, Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dan melalui email.

G. Desain Instrumen Penelitian

Kuesioner yang diberikan berisi tiga hal utama yaitu karakteristik dari responden, pertanyaan yang bersifat terbuka untuk melihat apakah responden sudah mengguna pelaporan keuangan untuk pembuatan keputusan dan pertanyaan tertutup untuk mengidentifikasi kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan-pernyataan untuk mengidentifikasi kebutuhan investor dan kreditor atas informasi atas pelaporan keuangan pemerintah daerah semuanya bersifat positif dengan pengukuran menggunakan skala Likert.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari hasil penelitian Martiningsih (2008) yang dikembangkannya dari penelitian Anthony (1978), Drebin et. al (1981), Jones (1985), Daniels & Daniels (1991), *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC)*

Study 1 (1991), Mack & Ryan (2006), dan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) No. 1 (2007). Instrumen ini kemudian dikembangkan sendiri oleh peneliti menjadi 43 pernyataan dalam kuesioner penelitian.

H. Definisi Operasional

Berikut ini adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. FASB mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian (*means of communication*) informasi tentang segala kondisi dan kinerja entitas terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui laporan keuangan (Suwardjono, 2006).
2. Investasi merupakan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata (Sarana, 2010).
3. Yang dimaksud dengan Investor dalam penelitian ini, adalah orang atau organisasi yang menanamkan waktu dan modalnya disuatu daerah atau untuk menjalankan usaha didaerah tersebut (osborne, 2005) dan atau orang atau organisasi yang akan menanamkan waktu modal pada didaerah tersebut (calon investor)
4. Yang dimaksud dengan kreditor dalam penelitian ini, adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih dan atau yang akan memiliki hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang dengan pemerintah daerah (Pardede, 2005).
5. Informasi kondisi keuangan, yaitu informasi yang bermanfaat untuk menentukan dan memprediksi aliran, posisi keuangan dan perubahannya,

- hasil operasional serta kebutuhan sumber keuangan unit pemerintah daerah (Martiningsih, 2008).
6. Informasi kondisi ekonomi, yaitu informasi untuk menentukan dan memprediksi kondisi unit pemerintah daerah dan perubahan di dalamnya (Martiningsih, 2008).
 7. Informasi kepatuhan terhadap aturan, yaitu informasi yang bermanfaat untuk memonitor kontribusi dan penggunaan sumber daya, perbandingan anggaran dengan aktual apakah sesuai aturan yang berlaku (Martiningsih, 2008).
 8. Informasi kinerja, yaitu informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah (Martiningsih, 2008).
 9. Informasi perencanaan dan penganggaran, yaitu informasi yang bermanfaat untuk perencanaan dan penganggaran aktivitas dan program pemerintah daerah (Martiningsih, 2008).
 10. Informasi naratif, yaitu informasi yang berisi *overview* operasi pemerintah, deskripsi sebelum laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban kepala pemerintahan serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Martiningsih, 2008).

I. Metode Analisis Data

Untuk mengeksplorasi kebutuhan investor dan kreditor atas Informasi Pelaporan Keuangan pemerintah daerah digunakan analisis deskriptif. Untuk mengetahui tingkat pencapaian rata-rata (TCR) responden pada variabel penelitian digunakan formula Riduwan (2008). Responden dianggap membutuhkan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah bila nilai TCR lebih besar dan sama dengan 68%.

Peneliti juga akan melakukan *content analysis* terhadap aturan tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu PP No. 24 Tahun 2005 terutama PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan serta Permendagri No. 13

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kebutuhan informasi investor dan kreditor. Aturan tentang pelaporan keuangan pemerintah dianggap sesuai dengan kebutuhan informasi investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, bila nilai TCR lebih besar dan sama dengan 68%. Selain itu untuk mengetahui apakah ada pengaruh karakteristik responden terhadap kebutuhan pengguna informasi laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan *Multivariate Analysis of Variance* (MANOVA).

J.Hasil Analisis Data

1. Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Dari pertanyaan poin B apakah responden sudah menggunakan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah untuk pengambilan keputusan berinvestasi di daerah maupun pada berinvestasi pada proyek pemerintah dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Responden yang Sudah Menggunakan Pelaporan Keuangan Pemerintah Dalam Pengambilan Keputusan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Sudah menggunakan	21	33%
2	Belum menggunakan	42	67%
Total		63	100%

Sumber: data primer diolah

Dari jawaban responden dapat diketahui bahwa sebahagian besar responden tidak menggunakan informasi yang ada pelaporan keuangan pemerintah daerah karena menurut sebahagian besar responden adalah karena sulitnya memperoleh pelaporan keuangan pemerintah, bahkan sebahagian besar dari responden tidak mengetahui bahwa pemerintah wajib untuk menyampaikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat seperti kewajiban pemerintah untuk menyampaikan pelaporan keuangan kepada dewan perwakilan rakyat.

Dari pertanyaan point C tentang informasi yang dibutuhkan oleh responden, diperoleh urutan informasi yang diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan derajat kepentingan sebagai berikut:

Tabel 3
Tingkat Capaian Rata-Rata Jawaban Investor dan Kreditor
Atas Kebutuhan Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ranking	Variable	Rerata	TCR
1	Perencanaan dan Penganggaran	4,00	80,00%
2	Naratif	3,99	79,89%
3	Kondisi Keuangan	3,97	79,40%
4	Kinerja	3,97	79,39%
5	Kondisi Ekonomi	3,93	78,87%
6	Kepatuhan Terhadap Aturan	3,76	75,16%
Rata-Rata		3,99	79,89%

Sumber: Lampiran 6

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa, semua hipotesis pertama terdukung, karena tingkat capaian masing-masing variabel lebih besar dari 68%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Hipotesis	H1	TCR	Keputusan
Hipotesis 1.1	$TCR1 \geq 68\%$	79,40 %	Tolak Ho
Hipotesis 1.2	$TCR2 \geq 68\%$	78,87%	Tolak Ho
Hipotesis 1.3	$TCR3 \geq 68\%$	75,16%	Tolak Ho
Hipotesis 1.4	$TCR4 \geq 68\%$	79,39%	Tolak Ho
Hipotesis 1.5	$TCR5 \geq 68\%$	80,00%	Tolak Ho
Hipotesis 1.6	$TCR6 \geq 68\%$	79,89%	Tolak Ho

Sumber: Lampiran 6

Dari seluruh informasi yang dibutuhkan oleh investor dan kreditor berikut ini akan diuraikan 10 informasi yang paling dibutuhkan oleh investor dan kreditor dari 43 informasi yang dibutuhkannya.

Tabel 5
Informasi Yang Paling Dibutuhkan Oleh Investor Dan Kreditor

No	Keterangan	Rata-Rata	TCR
1	Kebijakan Pemerintah dibidang investasi, perpajakan, perbankan serta ekspor impor	4,33	86,54%
2	Potensi unggulan daerah	4,27	85,40%
3	Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah, seperti: Pelayanan perizinan dan tarifnya	4,24	84,87%
4	Ketersediaan infrastruktur	4,24	84,76%
5	Stabilitas keamanan	4,22	84,44%
6	Stabilitas politik	4,21	84,13%
7	Perencanaan pemerintah 5 tahun ke depan	4,17	83,49%
8	Prediksi pertumbuhan pendapatan pemerintah	4,16	83,17%
9	<i>Trend</i> ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang	4,16	83,17%
10	Kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang	4,13	82,54%

Sumber: lampiran 6

Pada bagian berikut ini akan diuraikan informasi yang dibutuh oleh investor dan kreditor secara terpisah. Berikut ini akan dibahas 10 informasi yang paling dibutuhkan oleh investor dari 43 informasi yang dibutuhkannya.

Tabel 6
Informasi yang Paling di Butuhkan Oleh Investor

No	Keterangan	Rata-Rata	TCR
1	Kebijakan Pemerintah dibidang investasi, perpajakan, perbankan serta ekspor impor	4,33	86,51%
2	Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemda, seperti: Pelayanan perizinan dan tarifnya	4,27	85,43%
3	Potensi unggulan daerah	4,23	84,65%

4	Stabilitas politik	4,23	84,65%
5	Ketersediaan infrastruktur	4,21	84,19%
6	Stabilitas keamanan	4,21	84,19%
7	Perencanaan pemda 5 tahun ke depan	4,16	83,26%
8	Perencanaan alokasi sumber jasa yang dikelola pemerintah	4,14	82,79%
9	Prediksi pertumbuhan pendapatan pemda	4,09	81,86%
10	<i>Trend</i> ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang	4,05	80,93%

Sumber: Lapidan 6

Sedangkan informasi yang paling dibutuhkan oleh kreditor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7
Informasi yang Paling di Butuhkan Oleh Kreditor

No	Keterangan	Rata-Rata	TCR
1	Kemampuan pemda untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang	4,65	0,93
2	Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar)	4,50	0,90
3	Rincian dan analisis jumlah hutang pemda	4,45	0,89
4	Potensi unggulan daerah	4,35	0,87
5	Kebijakan Pemerintah dibidang investasi, perpajakan, perbankan serta ekspor impor	4,33	0,87
6	Prediksi pertumbuhan pendapatan pemda	4,30	0,86
7	Prediksi pertumbuhan perekonomian pemda	4,30	0,86
8	Perbandingan kinerja keuangan pemda tahun ini dengan tahun sebelumnya	4,30	0,86
9	Laporan pertanggungjawaban kepala pemda	4,30	0,86
10	Ketersediaan infrastruktur	4,30	0,86

Sumber: Lapidan 6

2. **Perbandingan Kesesuaian Aturan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Dengan Kebutuhan Investor Dan Kreditor Atas Informasi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berikut ini adalah perbandingan kesesuaian kebutuhan informasi investor dan kreditor laporan berdasarkan hasil empiris dengan aturan pelaporan keuangan pemerintah yaitu PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006:

Tabel 8
Kesesuaian PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006
Dengan Kebutuhan Investor dan Kreditor Atas Informasi dalam Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah

No	Jenis Informasi	Hasil Empiris	PP No. 24/2005	Permendagri 13/2006	Skor	TCR (%)
	INFORMASI KONDISI KEUANGAN					
1	Posisi aktiva, hutang dan aktiva bersih/ekuitas pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
2	Prediksi kebutuhan tambahan sumber keuangan	Penting	Tidak	Tidak	1	20
3	Perubahan aktiva bersih/ekuitas	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60
4	Rincian hasil operasional pemerintah daerah selama 1 periode pelaporan	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60
5	Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar)	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
6	Kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
7	Rincian dan analisis jumlah hutang pemerintah daerah	Penting	Tidak	Tidak	1	20
8	Prediksi pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah	Penting	Tidak	Tidak	1	20
	INFORMASI KONDISI EKONOMI					
9	Nilai dan potensi sumber jasa yang dikelola pemerintah daerah	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
10	Prediksi pertumbuhan	Penting	Tidak	Tidak	1	20

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

	ekonomi pemerintah daerah		diwajibkan	diwajibkan		
11	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto lima tahun terakhir	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60
12	Perkembangan ekspor impor	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60
13	Laju Inflasi	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60
14	Jumlah Pengangguran terbuka	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60
15	Pertumbuhan nilai investasi 5 tahun terakhir	Penting	Tidak	Tidak	1	20
16	Pendapatan perkapita penduduk	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60
17	Dampak aktivitas operasional pemerintah daerah terhadap Perekonomian	Penting	Tidak	Tidak	1	20
INFORMASI KEPATUHAN TERHADAP ATURAN						
18	Kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
19	Kecukupan kontribusi sumber daya untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah daerah	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
20	Kepatuhan penyajian laporan keuangan pemerintah dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
21	Perbandingan penerimaan dan pengeluaran aktual dengan anggaran	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
INFORMASI KINERJA						
22	Perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah tahun ini dengan tahun sebelumnya	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
23	Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah, seperti: Pelayanan perizinan dan tarifnya	Penting	Tidak	Tidak	1	20
24	Evaluasi efisiensi program dan aktivitas pemerintah daerah.	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100

25	Evaluasi efektivitas program dan aktivitas pemerintah daerah	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
26	Evaluasi program jangka pendek dan jangka panjang	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
	INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN					
27	Perencanaan pemerintah daerah 5 tahun ke depan	Penting	Tidak	Tercantum	3	60
28	Perencanaan alokasi sumber daya	Penting	Tidak	Tercantum	3	60
29	<i>Trend</i> ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang	Penting	Tidak	Tidak	1	20
30	Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah	Penting	Tidak	Tercantum	3	60
31	Prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan	Penting	Tidak	Tercantum	3	60
32	Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemerintah daerah	Penting	Tidak	Tidak	1	20
	INFORMASI NARATIF					
33	Deskripsi sebelum laporan keuangan	Penting	Tidak	Tidak	1	20
34	Laporan pertanggungjawaban kepala pemerintah daerah	Penting	Tidak	Tercantum	3	60
35	Kebijakan akuntansi	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
36	<i>Overview</i> operasi pemerintah daerah	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
37	Kondisi Geografis	Penting	Tidak	Tidak	1	20
38	Kondisi Demografis	Penting	Tidak	Tidak	1	20
39	Kebijakan Pemerintah bidang investasi, perpajakan, ketenagakerjaan, perbankan serta kebijakan bidang ekspor dan impor	Penting	Tidak	Tidak	1	20
40	Ketersediaan infrastruktur	Penting	Tidak	Tidak	1	20
41	Potensi unggulan daerah	Penting	Tidak	Tidak	1	20

42	Stabilitas politik	Penting	Tidak	Tidak	1	20
43	Stabilitas keamanan	Penting	Tidak	Tidak	1	20
	Persentase kesesuaian					57

Aturan tentang pelaporan keuangan dianggap sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah jika nilai TCR besar atau sama dengan 68%. Dari nilai TCR diatas dapat diambil kesimpulan aturan pelaporan keuangan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Carlson (1986), Daniels & Daniels (1991), Yuliarni (2003) dan Martingsih (2008).

3. Pengujian Pengaruh Karakteristik Responden terhadap Kebutuhan Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 9
Hasil *Multivariate Tests*

Effect		F	Sig
Tingkat pendidikan	Roy's Largest Root	3,176	0,009
Latar Belakang Pendidikan	Roy's Largest Root	3,706	0,004

Sumber: Lampiran 7

Hasil uji *Multivariate* menunjukkan bahwa karakteristik responden tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan mempengaruhi kebutuhan informasi pelaporan keuangan pemerintah secara serempak (*simultaneously*) yang dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Martiningsih (2008) dan Fotanella (2010).

K. Kesimpulan

1. Investor dan kreditor membutuhkan informasi kondisi keuangan, informasi kondisi ekonomi, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan dan penganggaran serta informasi naratif di dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Aturan pelaporan keuangan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor.
3. Tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan investor dan kreditor secara serempak berpengaruh terhadap kebutuhan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintahan daerah.

L. Saran

Saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang belum diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 dan atau Permendagri No. 13 tahun 2006, serta rekomendasi jenis laporan keuangan yang dibutuhkan yaitu:

No	Jenis Informasi	Rekomendasi Pelaporan Keuangan
1.	Prediksi kebutuhan tambahan sumber Keuangan	Informasi pelengkap/CALK
2.	Rincian dan analisis jumlah hutang Pemerintah	Laporan Hutang
3.	Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah seperti perizinan	Informasi pelengkap/CALK
4.	Perencanaan pemerintah 5 tahun ke depan	Informasi pelengkap/CALK
5.	Perencanaan alokasi sumber daya	Informasi pelengkap/CALK
6.	Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas	Informasi pelengkap/CALK

	pemerintah.	
7.	Prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan	Informasi pelengkap/CALK
8.	Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemerintah	Informasi pelengkap/CALK
9.	Deskripsi sebelum laporan keuangan	Informasi pelengkap/CALK
10.	Laporan pertanggungjawaban kepala Pemerintahan	Laporan Pertanggungjawaban
11.	Prediksi pertumbuhan pendapatan pemerintah	Informasi pelengkap/CALK
12.	deskripsi sebelum laporan keuangan	Informasi pelengkap/CALK
13.	Ketersediaan infrastruktur	Informasi pelengkap/CALK
14.	Potensi unggulan daerah	Informasi pelengkap/CALK
15.	Stabilitas politik	Informasi pelengkap/CALK
17.	Stabilitas keamanan	Informasi pelengkap/CALK

2. Laporan keuangan pokok pemerintah daerah yang ada saat ini seharusnya ditambah Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus/Defisit), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Hutang serta Laporan Pertanggungjawaban kepala pemerintah daerah.
3. Selain laporan keuangan pokok, pemerintah daerah disarankan menambah informasi pendukung/pelengkap lain sesuai rekomendasi di atas agar fungsi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai sarana prediktif dan prospektif dapat terpenuhi selain sebagai sarana akuntabilitas publik.

M. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah karena metode pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner, metode kuesioner ini memiliki keterbatasan berupa lemahnya kontrol terhadap keakuratan jawaban responden karena ada kemungkinan responden tidak menjawab dengan keadaan yang sesungguhnya.

N. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini adalah:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian dengan mengambil sampel diseluruh provinsi yang ada di Indonesia, sehingga hasilnya bisa digeneralisasi untuk Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya dapat melengkapi sampel pengguna laporan keuangan pemerintah lain yaitu pihak yang berperan dalam pemberian donasi/pinjaman seperti World Bank.

O. Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- BPPS, 2005, *Laporan Perekonomian Sumatera Barat tahun 2000-2005*.
- BPPS, 2007, *Direktori Perusahaan Tahun 2006*
- Daniels, Janet D. and Daniels, Craig E. 1991. *Municipal Financial Reports: What Users Want*. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 10 Issue1 pp 15-38.
- Fontanella, Amy, 2010, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Dalam Memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Tesis, Universitas Andalas, Padang
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, *Standar Akuntansi Pemerintahan, Telaah Kritis PP No. 24 Tahun 2005*, Yogyakarta: BPF
- Governmental Accounting Standard Board. 1998. *Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*. GASB, Norwalk, Com.
- Hapsari, Andhisa Setya. 2008. *Tinjauan Kebermanfaatan Laporan Keuangan Auditan BPK (Refleksi Eksistensi dan Peranan BPK)*
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi Cetakan keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa
- International Federation of Accountants. 1991. *Public Sector Committee Study*

Nomor 1. *Financial Reporting by National Governments.*

- International Federation of Accountants. 2000. Public Sector Committee Study Nomor 11. *Government Financial Reporting.*
- International Public Sector Accounting Standards Board. International Public Sector Accounting Standard 1 *Presentation of Financial Statements.* Issued January 2007
- Jones, Rowan, and Maurice Pendlebury, (2000), Public Sector Accounting, Fifth Edition, Pearson Education Ltd., England.
- Kurdi. Moch. Yasin. 2010. Pengembangan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Bidang Infrastruktur Artikel. Diunduh dari www.google.com tanggal 1 April 2010
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Martiningsih, RR. Sri, Pancawati. 2008. Analisis Kebutuhan Informasi Pemerintahan : Studi Pelaporan Keuangan Pemerintah. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada
- Mack, Janet and Christine Ryan. 2006. Reflections on the Theoretical Underpinnings of the General-Purpose Financial reports of Australian government Departments, *Accounting, Auditing & Accountability Journal.* Vol. 19 No. 4 pp. 592-612.
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. [Jurnal Akuntansi Pemerintahan](#) Vol. 2, No. 1, Mei 2006
- Nugroho, Ugie (2010), Bank BUMN dan Proyek Pemerintah. Artikel. Diunduh dari www.google.com
- Pambudhi, P. Agung, 2005, Rating of Investment Attractiveness among 214 Regencies & Cities, 2004 A Survey of Business Perception, Makalah dipresentasikan pada simposium Strengthening Public Services In Decentralizing Indonesia: Approaches for Measuring Performance of Local Governments, World Bank, Bali 28-29 Agustus.
- Paulsson, Gert. 2006. Accrual Accounting In The Public Sector: Experiences From The Central Government In Sweden. *Financial Accountability & Management*

- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prawatyo Aditya, Factor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 1996
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Riduwan, 2008. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Peneliti, Alfabeta, Bandung.
- Ryan, Christine; Trevor Stanley dan Morton Nelson. 2002. Accountability Disclosure by Queensland Local Government Councils: 1997-1999. Financial Accountability & Management, Vol. 18 (3).
- Sarana, Jiwa. Analitis Kinerja Investasi didaerah, artikel, penelusuran www.google.com tanggal 21 April 2010
- Steccolini, Ileana. 2002. Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin, September 2002.
- Sudjana, 2001, Persepsi Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik terhadap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah
- Suzeta, Paskah, Proyek Pemerintah, Swasta Ditargetkan Dapat US\$37 Miliar, Media Indonesia - Kamis, 20 Agustus, 2009
- Suwardjono. 2006. Teori Akuntansi: Perekrayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- Tim Peneliti Universitas Andalas, 2009, Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2009 Provinsi Sumatera Barat, Seminar Nasional, Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009.
- Yuliari, Gusti Putu Ayu. 2006. Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Indonesia: Suatu Studi Eksploratif mengenai Kebutuhan dan Permintaan Stakeholder akan Informasi Keuangan Pemerintah. Tesis UGM. Yogyakarta.